

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI (RTLH) KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Muhammad Naja 'Izhami<sup>1</sup>, Reno Affrian<sup>2</sup>, Anna Maryati<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : [najaizhami72@gmail.com](mailto:najaizhami72@gmail.com)

## ABSTRAK

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi Program RTLH di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 11 orang yang ditentukan secara purposive, meliputi unsur aparatur pemerintah, pendamping program, dan keluarga penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RTLH di Kecamatan Haur Gading dinilai sudah efektif, terutama dari sisi ketepatan sasaran dan manfaat yang dirasakan oleh penerima. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterlambatan realisasi kegiatan, keterbatasan anggaran, ketidaklengkapan data penerima, serta persoalan legalitas kepemilikan rumah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan akurasi data, penguatan sistem pengawasan, serta perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal agar efektivitas program dapat ditingkatkan di masa mendatang.

**Kata kunci:** efektivitas program, rehabilitasi sosial, rumah tidak layak huni, kesejahteraan masyarakat

## ABSTRACT

*The Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RTLH) is a government policy aimed at improving the welfare of low-income communities by providing housing that meets standards of adequacy, health, and safety. This study seeks to assess the effectiveness of the implementation of the RTLH Program in Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency, as well as to examine the factors that support and hinder its implementation. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. A total of 11 informants were purposively selected, comprising government officials, program facilitators, and beneficiary households. Data analysis was conducted using the interactive model proposed by Miles and Huberman. The findings indicate that the implementation of the RTLH Program in Haur Gading District is has been effective, particularly in terms of targeting accuracy and the benefits perceived by beneficiaries. Nevertheless, the program continues to face several challenges, including delays in implementation, limited budget allocation, incomplete beneficiary data, and issues related to housing ownership legality. Therefore, efforts to improve data accuracy, strengthen supervisory mechanisms, and enhance planning and budget management are necessary to increase the program's effectiveness in the future.*

**Keywords:** program effectiveness, social rehabilitation, uninhabitable housing, community welfare

## PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan sandang. Setiap orang menginginkan rumah yang layak untuk ditempati, karena rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, beristirahat, dan melindungi keluarga dari cuaca maupun ancaman luar (Sedarmayanti, 2016). Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Rumah tidak layak huni biasanya ditandai dengan kondisi bangunan yang rusak, atap bocor, lantai tanah, dinding rapuh, serta tidak memiliki sanitasi dan ventilasi yang memadai. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah.

Masalah rumah tidak layak huni banyak dijumpai terutama pada masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak. Untuk itu, pemerintah melaksanakan program bantuan sosial berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah agar bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman. Di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, program bantuan sosial rumah tidak layak huni juga telah dijalankan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala, seperti jumlah bantuan yang terbatas, proses pembangunan yang kadang tidak sesuai kebutuhan, serta adanya dugaan penerima bantuan yang kurang tepat sasaran.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, terdapat beberapa fenomena masalah krusial pada pelaksanaan Program Sosial RTLH di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masalah pertama berkaitan dengan kelengkapan data masyarakat yang kurang valid. Seringkali data penerima bantuan RTLH tidak mutakhir, seperti sertifikat rumah yang bukan atas nama pemilik rumah, adanya perubahan status ekonomi penerima, atau masalah koordinasi antar instansi. Akibatnya, penyaluran bantuan bisa terlambat. Berikut adalah data sebaran rumah tangga miskin (RTM) yang masuk kriteria RTLH tahun 2024 di beberapa desa:

Kendala kedua adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk program RS-RTLH pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 875.000.000 untuk 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM mendapatkan dana sebesar Rp 17.500.000, dengan rincian Rp 2.500.000 untuk upah dan Rp 15.000.000 untuk bahan. Wilayah Kecamatan Haur Gading mendapatkan kuota 8 orang KPM yang tersebar di 4 Desa, atau setara dengan Rp 140.000.000 (16% dari total anggaran). Sementara itu, alokasi anggaran tahun 2025 meningkat menjadi Rp 1.920.000.000 untuk 96 KPM, di mana nilai bantuan per KPM naik menjadi Rp 20.000.000. Kecamatan Haur Gading direncanakan mendapat kuota 26 KPM (27% dari alokasi). Meskipun ada kenaikan, data menunjukkan bahwa belum semua rumah tidak layak huni dapat terakomodasi karena keterbatasan dana dan kenaikan harga bahan bangunan yang mengurangi daya beli.

Selain masalah data dan anggaran, kendala ketiga menyangkut masalah lahan dan legalitas. Beberapa calon penerima bantuan RTLH terkendala bukti kepemilikan lahan yang sah. Hal ini menghambat proses pembangunan atau renovasi rumah dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai “Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara” untuk menjawab apakah program ini sudah berjalan efektif dalam membantu masyarakat miskin memiliki hunian yang layak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas program ini. Sebagai bahan acuan, terdapat beberapa penelitian

terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Shafwan (2023) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program cukup efektif pada indikator kemampuan operasional, pemanfaatan biaya, dan pelaksanaan program yang sesuai target. Namun, ditemukan ketidakefektifan pada aspek ketepatan waktu akibat keterlambatan pengurusan data dan penyelesaian kegiatan yang belum merata. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah kelengkapan data yang kurang valid, sedangkan faktor pendukungnya adalah kemampuan pelaksana yang baik (Shafwan, 2023).

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Siti Rahma Ayu Utari (2019) dari Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor”. Penelitian deskriptif ini menggunakan angket, observasi, dan wawancara untuk mengukur lima indikator efektivitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, ketepatan sasaran, dan perubahan nyata (kenyamanan hunian) sudah berjalan efektif. Akan tetapi, aspek ketepatan waktu dinilai kurang efektif karena durasi pengerjaan yang terlalu singkat, serta dana atau bahan bangunan yang dirasa kurang mencukupi. Selain itu, program ini belum efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penerima bantuan (Utari, 2019).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat bahwa masalah validitas data, ketepatan waktu, dan kecukupan anggaran sering menjadi kendala utama dalam program RTLH. Penelitian ini akan berfokus pada analisis serupa namun dengan lokus yang berbeda, yaitu di Kecamatan Haur Gading, untuk melihat apakah pola masalah yang sama terjadi atau terdapat karakteristik berbeda dalam pelaksanaannya.

Efektivitas merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menitikberatkan pada pencapaian hasil yang selaras dengan sasaran melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat. Berbeda dengan efisiensi yang berfokus pada penggunaan input, efektivitas lebih menekankan pada hasil akhir dan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, efektivitas menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan keterkaitan antara masukan, proses, dan keluaran (Hery, 2018).

Pengukuran efektivitas tidak dapat dilakukan secara tunggal karena dipengaruhi oleh konteks, tujuan, dan sudut pandang penilaian. Secara umum, efektivitas dapat dilihat dari kesesuaian antara rencana dan realisasi, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Selain itu, efektivitas juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur serta manfaat nyata yang dirasakan oleh sasaran program. Dengan demikian, efektivitas tercermin dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, mutu hasil, kesesuaian prosedur, dan kebermanfaat output.

Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan strategis pemerintah, termasuk pilihan untuk bertindak maupun tidak bertindak, dalam merespons permasalahan publik. Kebijakan ini ditetapkan oleh institusi pemerintah dan mengandung alokasi nilai yang berdampak langsung pada masyarakat. Proses kebijakan publik berlangsung melalui tahapan penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, implementasi, serta evaluasi, yang melibatkan interaksi antara kepentingan politik dan analisis kebijakan (Subarsono, 2021).

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan ekonomi yang menyebabkan individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Rendahnya tingkat pendapatan berdampak pada terbatasnya akses terhadap perumahan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menempatkan masyarakat dalam kondisi rentan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan program kesejahteraan sosial (Pasalong, 2018).

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan intervensi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan perbaikan rumah. Program ini tidak hanya berorientasi pada aspek fisik bangunan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga penerima manfaat.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut terdapat penerima program bantuan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang cukup banyak sehingga relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat penelitian berlangsung secara mendalam dan alamiah sesuai dengan kondisi objek di lapangan (Sugiyono, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen pendukung. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap paling mengetahui permasalahan secara mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Desa Pulantani, Kepala Desa Tangkawang, Aparat Desa Palimbangan Gusti, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta warga penerima bantuan RTLH di Desa Palimbangan Gusti, Pulantani, dan Tangkawang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi langsung ke lokasi penerima bantuan untuk mengamati kondisi fisik bangunan; (2) wawancara mendalam dengan informan terkait; dan (3) dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016), yang terdiri dari aktivitas reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Proses ini berlangsung terus menerus sampai data dianggap jenuh. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber dan teknik), analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta member check kepada narasumber.

## **PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**

#### **1. Ketepatan Sasaran**

##### **a. Persentasi penerima yang masuk kriteria target program**

Aspek ini melihat persentase penerima yang masuk kriteria target program untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada mereka yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program RTLH di Kecamatan Haur Gading sudah berjalan dengan efektif.

Efektivitas ini dibuktikan melalui proses seleksi yang ketat. Berdasarkan hasil wawancara, penerima bantuan terkonfirmasi berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan dengan kondisi ekonomi rendah. Hal ini diperkuat dengan adanya mekanisme verifikasi berjenjang/berlapis yang dilakukan mulai dari tingkat desa hingga dinas terkait

untuk meminimalisir kesalahan penentuan penerima manfaat.

Temuan wawancara tersebut sejalan dengan fakta empiris di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi fisik rumah penerima bantuan memang memenuhi indikator ketidaklayakan huni, seperti adanya kerusakan signifikan pada struktur dinding, lantai yang masih berupa tanah atau rusak berat, atap yang bocor, serta sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan. Tidak ditemukan adanya penerima bantuan yang memiliki rumah dalam kondisi layak huni sebelumnya.

Selain bukti fisik dan pengakuan informan, ketepatan sasaran ini juga didukung oleh bukti administrasi. Penelusuran terhadap dokumen pendukung—seperti proposal pengajuan, berita acara musyawarah desa, serta data hasil verifikasi Dinas Sosial—menunjukkan bahwa seluruh tahapan seleksi telah mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Dengan demikian, mengacu pada teori Makmur (2015:7–8), dimensi ketepatan sasaran telah terpenuhi karena adanya konsistensi antara data administratif, kondisi riil di lapangan, dan kebutuhan masyarakat sasaran.

b. **Tingkat Orang Yang Tidak Berhak Menerima**

Selain memastikan penerima masuk kriteria, indikator ketepatan sasaran juga diukur dari tingkat orang yang tidak berhak menerima bantuan (exclusion error). Indikator ini krusial untuk menilai sejauh mana bantuan terdistribusi secara adil dan meminimalisir kebocoran pada pihak yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai elemen—mulai dari Dinas Sosial, TKSK, TFL, pemerintah desa, hingga warga—dapat disimpulkan bahwa tingkat penerima yang tidak berhak pada Program RTLH di Kecamatan Haur Gading sangat rendah, bahkan tidak ditemukan indikasi penyimpangan. Seluruh narasumber sepakat bahwa ketatnya proses pengecekan dan verifikasi berjenjang telah berhasil menyaring penerima secara akurat.

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil observasi lapangan. Peninjauan langsung terhadap objek bantuan menunjukkan bahwa rumah-rumah yang diperbaiki memang memiliki kondisi fisik yang memprihatinkan dan tidak layak huni. Tidak ditemukan adanya indikasi bantuan yang "salah alamat" atau diberikan kepada keluarga yang tergolong mampu (rumah permanen/baik). Hal ini diperkuat pula oleh bukti dokumentasi kondisi rumah sebelum pemugaran (titik nol persen), yang secara visual memvalidasi bahwa penetapan penerima telah objektif.

Dengan demikian, berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program RTLH di Kecamatan Haur Gading telah memenuhi standar efektivitas ketepatan sasaran. Tidak ditemukannya penerima yang tidak berhak membuktikan bahwa proses pendataan dan verifikasi telah berjalan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas Makmur (2015:7-8), di mana ketepatan sasaran tercapai ketika bantuan terserap sepenuhnya oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

## **2. Ketepatan Waktu**

a. **Kesesuaian Jadwal Pelaksana**

Indikator kedua dalam pengukuran efektivitas adalah ketepatan waktu, yang secara spesifik dilihat dari aspek kesesuaian jadwal pelaksanaan. Indikator ini mengukur apakah seluruh rangkaian kegiatan program berjalan sesuai dengan lini masa (timeline) yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program RTLH di Kecamatan Haur

Gading secara umum berjalan cukup efektif dan sesuai jadwal.

Secara realitas di lapangan, pelaksanaan program memang menghadapi beberapa tantangan yang menyebabkan keterlambatan parsial. Kendala utama yang ditemukan dominan disebabkan oleh faktor alam, seperti kondisi banjir, pasang surut air sungai yang menghambat transportasi material, serta tingginya curah hujan. Selain itu, terdapat penyesuaian jadwal akibat aktivitas sosial masyarakat setempat. Meskipun demikian, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Dinas Sosial, TKSK, TFL, pemerintah desa, hingga penerima bantuan—menilai bahwa keterlambatan tersebut masih dalam batas toleransi yang wajar dan tidak bersifat fatal.

Hasil observasi dan dokumentasi laporan kegiatan memperkuat temuan bahwa tahapan krusial, mulai dari pendataan, distribusi material, hingga penyelesaian pembangunan fisik, tetap terlaksana dalam rentang waktu tahun anggaran yang ditetapkan. Penyesuaian-penyesuaian kecil (minor adjustments) yang dilakukan di lapangan terbukti efektif mengatasi hambatan cuaca sehingga target penyelesaian bangunan sebelum tenggat waktu tetap tercapai.

Dengan demikian, ketepatan waktu dalam program ini dinilai berhasil. Hambatan teknis yang muncul tidak sampai menggagalkan pencapaian target akhir. Hal ini selaras dengan pendapat Makmur (2015:7-8) yang menyatakan bahwa efektivitas ketepatan waktu merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan kegiatan dalam sebuah organisasi; di mana program ini terbukti mampu memitigasi kendala waktu sehingga tujuan tetap tercapai.

#### b. Kecepatan Penyaluran Bantuan

Selain kesesuaian jadwal, indikator ketepatan waktu juga ditinjau dari aspek kecepatan penyaluran bantuan. Aspek ini mengukur responsivitas pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang berhak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pola penyaluran bantuan RTLH di Kecamatan Haur Gading memiliki karakteristik khusus, yaitu cenderung direalisasikan pada pertengahan tahun. Strategi waktu ini dinilai paling efektif dan rasional oleh para informan mengingat kondisi geografis wilayah yang rawan banjir, sehingga pengerjaan fisik menuntut kondisi cuaca yang kering (musim kemarau) serta kesiapan anggaran yang matang.

Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa kasus keterlambatan yang bersifat kasuistik akibat kendala administratif, secara umum informan sepakat bahwa mekanisme penyaluran berjalan cukup responsif. Proses rehabilitasi fisik rumah terbukti berlangsung relatif cepat ketika material dan tenaga kerja sudah tersedia di lokasi. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara dinas terkait, pemerintah desa, dan penerima manfaat. Dengan demikian, kecepatan penyaluran bantuan dinilai cukup efektif karena mampu menyeimbangkan antara kecepatan distribusi dengan ketepatan momentum pelaksanaan fisik di lapangan. Hal ini kembali memperkuat terpenuhinya prinsip efektivitas waktu menurut Makmur (2015), di mana keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh manajemen waktu yang adaptif terhadap kondisi lingkungan.

### 3. Ketepatan Kualitas

#### a. Tingkat Kesesuaian Hasil (Barang/Layanan)

Efektivitas program selanjutnya dinilai dari indikator ketepatan kualitas, yang berfokus pada tingkat kesesuaian hasil fisik bangunan dengan standar kelayakan yang ditetapkan. Indikator ini mengukur sejauh mana output kegiatan—dalam hal ini rumah yang telah direhabilitasi—memenuhi spesifikasi teknis dan standar hunian yang sehat. Berdasarkan hasil

penelitian, kualitas bangunan RTLH di Kecamatan Haur Gading dinilai cukup efektif dan telah memenuhi standar kualitas maupun anggaran yang tersedia.

Temuan menarik dari hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjaga kualitas bangunan adalah adanya kebebasan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk memilih bahan bangunan sendiri sesuai dengan alokasi anggaran. Kebijakan ini dinilai efektif karena penerima manfaat cenderung memilih material terbaik untuk rumah mereka sendiri. Mayoritas informan menyatakan bahwa hasil bangunan menjadi lebih kokoh, rapi, dan layak huni dibandingkan kondisi sebelumnya.

Hasil observasi lapangan mendukung pernyataan tersebut. Secara visual, bangunan RTLH menunjukkan struktur yang kokoh dengan spesifikasi dasar rumah layak huni yang terpenuhi, terutama pada perbaikan komponen vital seperti atap, dinding, dan lantai. Meskipun demikian, ditemukan adanya variasi tingkat kerapian dan kualitas akhir pada beberapa rumah. Hal ini wajar terjadi mengingat kondisi awal kerusakan rumah yang berbeda-beda serta perbedaan kemampuan teknis tukang yang mengerjakan di setiap lokasi.

Kesesuaian ini juga terkonfirmasi melalui bukti dokumentasi. Foto progres dan catatan teknis memperlihatkan keselarasan antara rencana perbaikan dengan hasil akhir fisik di lapangan. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi minor akibat kondisi awal rumah, secara umum hasil pembangunan telah memberikan manfaat nyata berupa hunian yang kokoh. Hal ini sejalan dengan teori Makmur (2015:7-8), di mana efektivitas ketepatan kualitas tercapai ketika hasil akhir kegiatan (barang/jasa) memiliki konformitas/kesesuaian dengan standar kualitas yang telah direncanakan sebelumnya.

#### b. Tingkat Kepuasan Penerima

Selain aspek teknis bangunan, indikator ketepatan kualitas juga divalidasi melalui tingkat kepuasan penerima manfaat. Aspek ini menjadi tolak ukur subjektif namun krusial untuk melihat efektivitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan—baik dari unsur dinas, pemerintah desa, maupun penerima bantuan—terungkap bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program RTLH tergolong sangat tinggi. Para penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan ini sangat efektif dalam meringankan beban ekonomi mereka. Lebih jauh lagi, hasil rehabilitasi rumah memberikan dampak psikologis positif berupa rasa aman, nyaman, dan kebanggaan memiliki hunian yang layak, yang sebelumnya sulit mereka dapatkan.

Ungkapan kepuasan tersebut selaras dengan hasil observasi di lapangan. Perubahan fisik bangunan yang signifikan terlihat berkorelasi lurus dengan peningkatan kenyamanan penghuni. Rumah-rumah yang telah diperbaiki tampak lebih aman dan memenuhi standar kebutuhan dasar, sehingga warga dapat menempatinnya dengan tenang.

Dengan demikian, integrasi antara pengakuan rasa syukur warga dan bukti fisik yang layak huni menunjukkan bahwa program ini sukses memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini menegaskan kembali terpenuhinya dimensi ketepatan kualitas menurut Makmur (2015:7-8), di mana standar kualitas sebuah program tidak hanya berhenti pada spesifikasi teknis barang, melainkan harus bermuara pada kepuasan dan kesejahteraan penerima manfaatnya.

### 4. Ketepatan Prosedur

#### a. Keterpenuhan Kelengkapan Dokumen

Aspek ini meninjau sejauh mana persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah dapat dipenuhi oleh calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemenuhan dokumen dalam Program RTLH di Kecamatan Haur Gading dinilai sangat efektif.

Efektivitas ini didorong oleh persyaratan yang ditetapkan relatif sederhana dan mendasar, yakni hanya berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti kepemilikan tanah atau rumah. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kesederhanaan syarat ini memudahkan masyarakat sasaran. Meskipun di lapangan ditemukan beberapa kendala minor—seperti status tanah yang belum balik nama atau masalah sengketa lahan keluarga—hal tersebut dapat diatasi berkat peran aktif pemerintah desa yang memberikan pendampingan intensif. Aparat desa dinilai sangat responsif dalam membantu warga mengurus kelengkapan berkas sehingga proses administrasi tidak menjadi penghambat.

Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi dan studi dokumentasi. Secara administratif, seluruh berkas penerima bantuan yang telah lolos verifikasi terbukti lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya data yang cacat administrasi dalam arsip penerima bantuan. Kelancaran proses pemberkasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan di atas koridor aturan yang benar. Hal ini selaras dengan teori Makmur (2015:7-8), yang menekankan bahwa efektivitas prosedur tercapai ketika seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan, termasuk administrasi awal, dilakukan secara disiplin mengikuti pedoman dan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

b. Standard Operating Procedure (SOP)

Selain kelengkapan dokumen, ketepatan prosedur juga diukur secara krusial melalui kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Aspek ini memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan secara sistematis, konsisten, dan transparan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program RTLH di Kecamatan Haur Gading terbukti telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan atau efektif.

Konfirmasi dari seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Dinas Sosial, tenaga pendamping (TKSK dan TFL), pemerintah desa, hingga penerima manfaat—menegaskan bahwa tidak ada prosedur yang dilewati. Seluruh tahapan program, mulai dari pendataan awal, verifikasi berkas, validasi faktual di lapangan, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima hasil pekerjaan, dilakukan secara runtut dan prosedural. Konsistensi ini didukung oleh pengawasan melekat yang dilakukan oleh aparat desa dan pendamping di lapangan.

Temuan observasi memperkuat fakta bahwa mekanisme kerja berjalan tertib tanpa adanya indikasi penyimpangan alur (bypass) atau pelanggaran petunjuk teknis. Setiap tahap dilaksanakan secara transparan dan mematuhi regulasi daerah yang menjadi landasan hukum program. Kepatuhan terhadap alur kerja ini menegaskan terpenuhinya indikator ketepatan prosedur menurut Makmur (2015:7-8), yang mensyaratkan bahwa efektivitas tercapai ketika seluruh proses kegiatan mengikuti langkah-langkah yang benar, tidak menyimpang dari pedoman, dan patuh pada standar operasional yang baku.

## 5. Ketepatan Manfaat

a. Dampak Program Dalam Mengubah Kondisi Penerima

Indikator terakhir untuk mengukur efektivitas program adalah ketepatan manfaat. Indikator ini berfokus pada dampak nyata yang dirasakan oleh penerima setelah program dilaksanakan, baik berupa perubahan fisik, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, Program RTLH di Kecamatan Haur Gading terbukti sangat efektif dalam mengubah kondisi kehidupan penerima ke arah yang lebih baik.

Temuan utama dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah peningkatan kualitas hidup dasar. Keluarga penerima manfaat kini merasa

jauh lebih aman, sehat, dan tenang menempati rumah mereka. Hilangnya kekhawatiran terhadap kondisi rumah yang rusak (seperti atap bocor atau dinding rapuh) memberikan dampak psikologis positif, sehingga penerima dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan lain, seperti pendidikan anak dan peningkatan ekonomi keluarga. Pemerintah desa dan pendamping program juga mengonfirmasi adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang nyata pasca-rehabilitasi.

Hasil observasi lapangan dan dokumentasi visual memperkuat temuan ini. Secara fisik, rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini bertransformasi menjadi hunian yang kokoh, tertata, dan memenuhi standar kesehatan. Perubahan kondisi lingkungan rumah yang lebih bersih dan rapi turut mendukung terciptanya pola hidup yang lebih sehat bagi penghuninya.

Secara keseluruhan, integrasi antara perbaikan fisik dan peningkatan rasa aman ini membuktikan bahwa program telah berhasil mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan teori Makmur (2015:7-8) mengenai ketepatan manfaat, di mana efektivitas program diukur dari sejauh mana intervensi yang dilakukan mampu memberikan manfaat riil yang komprehensif tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup sasarannya.

b. **Kesinambungan Manfaat Program Setelah Intervensi Selesai**

Selain dampak langsung, aspek krusial lainnya adalah kesinambungan manfaat pasca-intervensi. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan fungsi bantuan setelah program selesai secara administratif. Berdasarkan hasil wawancara, manfaat Program RTLH dinilai bersifat jangka panjang dan efektif. Narasumber menekankan bahwa rumah yang kini lebih layak tidak hanya memberikan kenyamanan sesaat, tetapi juga membangun fondasi ketahanan keluarga terhadap tantangan lingkungan, seperti cuaca ekstrem dan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, rasa aman yang timbul menumbuhkan kepercayaan diri keluarga untuk berinteraksi sosial dan mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Observasi lapangan mengonfirmasi bahwa struktur bangunan yang dihasilkan memiliki kualitas konstruksi yang kokoh dengan sistem ventilasi yang lebih baik. Kondisi fisik ini memungkinkan rumah untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama (bertahun-tahun) dengan perawatan yang wajar. Dengan demikian, integrasi antara ketahanan fisik bangunan dan dampak psikososial yang berkelanjutan menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat karitatif sesaat, melainkan investasi kesejahteraan jangka panjang. Hal ini memvalidasi teori Makmur (2015) bahwa efektivitas paripurna tercapai ketika manfaat program terus dirasakan secara nyata oleh sasaran penerima jauh setelah bantuan diserahkan.

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah terjalinnya kerja sama yang baik antar pelaksana. Koordinasi yang efektif antara pegawai pelaksana, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya memungkinkan setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan saling mendukung. Kerja sama yang harmonis ini berperan penting dalam memperlancar pelaksanaan program, meminimalkan kendala di lapangan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan program.

## 2. Faktor Penghambat

Pertama, hambatan teknis pelaksanaan, terutama kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti curah hujan yang tinggi dan terjadinya banjir, mengingat pelaksanaan program dilakukan mendekati akhir tahun. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya proses pembangunan dan rehabilitasi rumah, baik dari segi waktu maupun akses ke lokasi penerima bantuan. Kedua, hambatan kapasitas dan sumber daya penerima manfaat, yang meliputi keterlambatan dan ketidaksesuaian kualitas bahan bangunan, sulitnya distribusi material ke lokasi tertentu, keterbatasan stok bahan bangunan, serta kekurangan biaya untuk upah tukang dan swadaya dari penerima bantuan. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan proses pembangunan rumah tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan program RTLH dipengaruhi oleh kerja sama yang baik antar pelaksana sebagai faktor pendukung, serta hambatan teknis dan keterbatasan kapasitas serta sumber daya penerima manfaat sebagai faktor penghambat. Oleh karena itu, upaya penanganan hambatan tersebut perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara umum telah berjalan efektif ditinjau dari teori efektivitas Makmur (2015). Kesimpulan ini didasarkan pada lima indikator utama. Pertama, ketepatan sasaran dinilai sangat efektif karena didukung oleh proses verifikasi berjenjang yang ketat sehingga tidak ditemukan adanya penerima yang tidak berhak (*exclusion error*). Kedua, ketepatan waktu tergolong cukup efektif; meskipun terdapat kendala teknis akibat kondisi geografis (banjir) dan cuaca, strategi penyaluran bantuan di pertengahan tahun dan kemampuan adaptasi pelaksana di lapangan membuat target penyelesaian tetap tercapai sesuai tahun anggaran. Ketiga, ketepatan kualitas berjalan efektif karena adanya pelibatan penerima dalam pemilihan bahan bangunan, yang berdampak pada tingginya kepuasan penerima terhadap hasil hunian yang kokoh dan layak. Keempat, ketepatan prosedur sangat efektif, ditandai dengan kelengkapan administrasi yang terpenuhi berkat pendampingan aktif aparat desa serta kepatuhan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tahapan. Kelima, ketepatan manfaat sangat efektif dan berkelanjutan, di mana program ini tidak hanya berhasil mengubah kondisi fisik rumah menjadi layak huni, tetapi juga memberikan dampak ikutan berupa peningkatan kesehatan, rasa aman, kepercayaan diri, dan ketahanan sosial ekonomi keluarga penerima dalam jangka panjang. Esensi dari temuan ini menunjukkan bahwa pelibatan aktif unsur desa dan fleksibilitas teknis yang tetap patuh pada aturan merupakan kunci utama keberhasilan program RTLH di wilayah dengan tantangan geografis seperti Haur Gading.

## DAFTAR PUSTAKA

Hery (2018) *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Grasindo.

Makmur, (2015) *Efektivitas Kelembagaan Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pasalong, H. (2018) *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

Sedarmayanti (2016) *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Shafwan, A. (2023) 'Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan'. Amuntai.



Subarsono, A.G. (2021) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Utari, S.R.A. (2019) 'Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin'. Jakarta.